

**KETENTUAN BATAS MINIMUM USIA CALON  
PEMEGANG KARTU KREDIT  
(Studi Konsistensi Pasal 15 A PBI NO. 14/2/PBI/2012 Dengan Pasal 1320  
KUHPerdata Dan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan )**

**ARTIKEL ILMIAH**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum

**OLEH :**  
**ALFIRINA ARDYAS TUTIK**  
**0910113071**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2013**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**Judul Artikel Ilmiah : KETENTUAN BATAS MINIMUM  
USIA CALON PEMEGANG KARTU KREDIT  
(Studi Konsistensi Pasal 15A PBI  
No. 14/2/PBI/2012 Dengan Pasal 1320  
KUHPerdara Dan Pasal 47 ayat 1  
Undang-Undang Perkawinan)**

**Identitas Penulis :**  
**a. Nama : ALFIRINA ARDYAS TUTIK**  
**b. NIM : 0910113071**  
**Konsentrasi : Hukum Perdata Bisnis**  
**JangkaWaktu Penelitian : 4 bulan**

**Disetujui pada tanggal : 07 Januari 2013**

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Siti Hamidah, S.H. M.M.  
NIP.19660622 199002 2 001

Rachmi Sulistyarini, S.H. M.H.  
NIP.19611112 198601 2 001

Mengetahui  
Ketua Bagian Umum Perdata

Siti Hamidah, S.H. M.M.  
NIP.19660622 199002 2 001

**KETENTUAN BATAS MINIMUM USIA CALON PEMEGANG  
KARTU KREDIT  
(Studi Konsistensi Pasal 15 A PBI NO. 14/2/PBI/2012 dengan Pasal 1320  
KUHPerduta dan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan )**

**ALFIRINA ARDYAS TUTIK**  
0910113071  
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
alfirina\_ardyas@yahoo.co.id

**ABSTRAK**

Alfirina Ardyas Tutik, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Desember 2012, KETENTUAN BATAS MINIMUM USIA CALON PEMEGANG KARTU KREDIT (Studi Konsistensi Pasal 15 A PBI No. 14/2/PBI/2012 Dengan Pasal 1320 KUHPerduta Dan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan), Siti Hamidah, SH. MM, Rachmi Sulistyarini, SH. MH.

Dengan segala fasilitas dan kemudahan yang dimiliki kartu kredit, pada saat ini orang tua memberikan fasilitas kartu kredit kepada anak dengan mengabaikan batasan usia. Ini sangat berbanding terbalik dengan aturan undang-undang yang mengatur tentang batas usia. Mendasarkan pada penerbitan kartu kredit antara pihak bank dan nasabah tidak dapat dilepaskan dari perikatan yang dibuat kedua belah pihak, yaitu bersumber pada perjanjian. Dalam hal ini suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat perjanjian yang diatur dalam pasal 1320KUHPerduta, dimana salah satu syarat tersebut adalah harus cakap hukum atau sudah dewasa. Batas kedewasaan seseorang dapat dikatakan cakap dapat dilihat dari Pasal 1320 KUHPerduta dan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Saat ini yang menjadi tolak ukur seseorang dianggap dewasa atau cakap bertindak ialah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan hal tersebut, tujuan penulis mengangkat masalah ini adalah Untuk mengkaji dan menganalisis konsistensi PBI NOMOR. 14/2/PBI 2012 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu konsisten terhadap Hukum Yang Berlaku Di Indonesia yang mengatur Batasan Umur, khususnya bila dikaji berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta dan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Kemudian karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh penulis akan menganalisis peraturan perundang-undangan dari hirarki yang paling rendah hingga tertinggi yang berkaitan dengan batas minimum usia calon pemegang kartu kredit konsistensi PBI No.14/2/PBI/2012 tentang APMK.

Dari penelitian dengan metode diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Konsistensi Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/2/PBI/2012 dalam ketentuan batas minimum usia calon pemegang kartu kredit terhadap KUHPerduta dari penelitian diatas Peraturan Bank Indonesia (PBI) tidak konsisten karena

dalam pengaturannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) tidak mendasar pada penetapan batas minimum usia dalam KUHPdata dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 18 tahun, sedangkan dalam PBI No Nomor 14/2/PBI/2012 batas minimum usia calon pemegang kartu kredit 17 tahun. Kata Kunci: Kartu Kredit, Batas Minimum Usia.

### **ABSTRACT**

With all the amenities and conveniences that owned a credit card, at the moment the parents give credit card facilities to the child by ignoring the age limit. It is inversely proportional to the rules governing the legislation about the age limit. Basing on the issuance of a credit card between the bank and the customer cannot be released from the Alliance who made both parties, that is sourced on the agreement. In this case an agreement must meet the terms of the agreement are governed by article 1320KUHPdata, where one of the conditions is to be accomplished or an adult. Maturity limits one can be said to be capable of properly can be seen from Article KUHPdata and article 47 172 paragraph 1 of Act No. 1 of 1974 about marriage. The current benchmark one legally an adult or qualified to act is Act No. 1 of 1974 about marriage.

As such, the purpose of the author raised this issue is to examine and analyze konsistensi PBI number. 14/2/PBI 2012 About Organizing activities of the means of payment Using the card is consistent with respect to the applicable law In Indonesia that set limitations on Age, particularly when examined under article KUHPdata and article 47 172 paragraph 1 of Act No. 1 of 1974 about marriage. Then this paper using the method of normative juridical approach method of legislation (the statute approach). The primary legal materials, secondary and tertiary retrieved the author will analyse legislation from the lowest hierarchy up to high with regard to the minimum age of candidates for credit card holders of the consistency of PBI No. 7/2/PBI/2012 about APMK.

From research with the above methods, authors can draw the conclusion that Bank Indonesia Regulations Consistency (PBI) No. 7/2/PBI/2012 in terms of minimum age limit for potential credit card holder with respect to the above Regulation research KUHPdata from Bank Indonesia (PBI) is inconsistent because the Bank Indonesia Regulations in setting it up (PBI) is not fundamental in the determination of the minimum age limit in KUHPdata and law No. 1 of 1974 about the Perkawinan that is 18 years of age While in PBI No. number 14/2/PBI/2012 minimum age of potential credit card holders 17 years.

Keywords: Credit Card, The Minimum Age Limit.

### **A. Pendahuluan**

Berkembangnya kartu kredit selain ditunjang oleh kondisi ekonomi yang semakin membaik, juga karena kartu ini sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat kota. Namun di sisi lain, persaingan di bisnis kartu kredit terlihat semakin ketat. Sekarang ini, hampir di seluruh supermarket sudah disediakan fasilitas untuk bertransaksi menggunakan kartu kredit. Apabila

dahulu, kartu kredit dipakai untuk berjaga-jaga jika ada kebutuhan yang penting dan mendadak. Maka saat ini, penggunaan kartu kredit telah bergeser menjadi alat pembayaran sehari-hari, melebihi uang biasa

Pertumbuhan yang signifikan ini menunjukkan bahwa kartu kredit kini makin populer sebagai alat pengganti uang *cash*<sup>1</sup>, bahkan telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern di Indonesia, seperti halnya di mancanegara. Dipicu oleh perkembangan *lifestyle*<sup>2</sup> masyarakat di kota-kota besar, pertumbuhan bisnis kartu kredit ini juga ditunjang oleh beragamnya program menarik yang ditawarkan perusahaan penerbit, mengikuti selera dan kebutuhan nasabah yang makin bervariasi. Selain itu, kartu kredit juga memudahkan bagi para pemegang kartu kredit, seperti :

- a) Sebagai pengganti pembayaran tunai.
- b) Untuk keperluan mendadak, seperti keperluan mendadak rumah sakit
- c) Memudahkan pembayaran rutin setiap bulannya.

Oleh sebab itu berbagai tawaran kartu kredit yang menarik saat ini banyak bertebaran di sejumlah media cetak, elektronik, media online, dan juga melalui layanan SMS.

Dengan segala fasilitas dan kemudahan yang dimiliki kartu kredit, pada saat ini orang tua memberikan fasilitas kartu kredit kepada anak dengan mengabaikan batasan usia. Ini sangat berbanding terbalik dengan aturan undang-undang yang mengatur tentang batas usia. Melihat penerbitan kartu kredit antara pihak bank dan nasabah tidak dapat dilepaskan dari perikatan yang dibuat di antara kedua belah pihak, yaitu bersumber pada perjanjian<sup>3</sup>. Dalam hal ini suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPdata, dimana salah satu syarat perjanjian tersebut harus cakap hukum. Seseorang yang cakap hukum itu harus tidak boros, sehat akal pikir dan tidak dibawah umur. Pada batas umur ini diatur dalam KUHPdata minimal 21 tahun menurut KUHPdata yang diterapkan

---

<sup>1</sup> *Cash* adalah uang tunai

<sup>2</sup> *Lifestyle* adalah Gaya hidup

<sup>3</sup> Endang Puraningsih, **Hukum Bisnis**, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), H. 37

dalam pasal 330 KUHPdata yang berbunyi :“ Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Tetapi pasal 330 ini sudah tidak digunakan karena asas *lex posteriori* derogat *lex priori* dimana peraturan yang baru menggantikan peraturan yang lama.

Batas umur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 minimal 18 tahun, menurut Undang-Undang perkawinan bisa disimpulkan batas usia dewasa 18 tahun dari pasal 47 dan pasal 50 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 . Namun kenyataan nya anak usia 17 tahun dapat memohon untuk dibuatkan kartu kredit seperti dalam sebuah artikel dalam situs internet<sup>4</sup>:

“Memberikan kartu kredit kepada anak merupakan suatu pelatihan kepercayaan dan tanggungjawab yang luar biasa, baik bagi orangtua maupun bagi anak itu sendiri,” *Vice President, Card Marcom & Strategic Head*, Citibank N.A. Indonesia kata Maria Sukrisman, dalam keterangannya beberapa waktu lalu di Jakarta.

“Penerbit kartu kredit di Indonesia pada umumnya mengizinkan pemberian suplemen bagi anak yang sudah memiliki tanda pengenal seperti KTP, yaitu menginjak usia 17 tahun,” lanjutnya.

Melihat pendapat tersebut mayoritas orang tua setuju bahwa anak-anak harus belajar mandiri. Sejak dini mereka diajarkan menabung dan membuat anggaran serta, bila perlu, mampu memperoleh penghasilan sendiri. Salah satu cara yang dapat ditempuh dalam mengajarkan cara mengelola keuangan anak adalah dengan memberikan kartu kredit. Dan berdasar pada kenyataan dilapangan yang dipertegas sumber dari situs internet itu penerbit kartu kredit di Indonesia umumnya mengizinkan anak yang sudah memiliki tanda pengenal seperti KTP, menginjak usia 17 tahun.

Pernyataan seperti diatas dipertegas juga dalam penjelasan pasal 15 A ayat 1 Peraturan Bank Indonesia NOMOR. 14/2/PBI 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia NOMOR 11/11/PBI/2009 Tentang

---

<sup>4</sup> Admin Mafia Kartu Kredit,2011, *Persyaratan Usia Memiliki Kartu Kredit*, <http://www.mafiakartukredit.com/2011/07/persyaratan-usia-memiliki-kartu-kredit.html>. (13 Mei 2012,)

Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, kartu kredit adalah Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK), sebagai berikut :

Persyaratan batas minimum usia, batas minimum pendapatan, batas maksimum plafon kredit, batas maksimum jumlah Penerbit yang dapat memberikan fasilitas Kartu Kredit, dimaksudkan agar Pemegang Kartu bijak menggunakan Kartu Kredit sebagai alat pembayaran yang dananya bersumber dari kredit serta penggunaannya sesuai dengan kemampuan bayar. Batas minimum usia calon Pemegang Kartu dibuktikan dengan dokumen identitas resmi, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), atau paspor.

Melihat penjelasan dari Peraturan Bank Indonesia maka tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh orang tua untuk memberi ijin anak usia 17 tahun mempunyai kartu kredit dan juga pada pihak bank menerbitkan kartu kredit untuk anak karena tidak ada batasan yang tepat, kecuali terdapat aturan pengecualian dimana anak tersebut sudah melangsungkan pernikahan dimana usia belum 21 tahun maka anak tersebut sudah dapat dikatakan dewasa. Menyediakan fasilitas kartu kredit kepada anak memberikan beberapa keuntungan yaitu menghindari risiko membawa uang tunai terlalu banyak. Melalui kartu kredit, Orang tua juga dapat mengontrol pengeluaran dan kemampuan putra-putri dalam mengelola kredit. Orang tua dapat melihat transaksi yang mereka lakukan melalui tagihan bulanan, sehingga orang tua juga dapat melihat kebiasaan anak dan dengan demikian mengetahui masalah apa yang mungkin timbul di masa mendatang. Berdasarkan informasi itu, Orang tua dapat berdiskusi dengan anak tentang cara-cara yang benar dalam menggunakan kartu kredit, sebelum nanti mereka memilikinya sendiri ketika sudah mempunyai penghasilan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana konsistensi pengaturan batasan usia minimal calon pemegang kartu kredit yang diatur pada pasal 15 A PBI NOMOR. 14/2/PBI 2012 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan

Kartu menurut Pasal 1320 KUHPdata dan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

### **C. Metode Penelitian**

#### **Jenis & Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif karena meneliti dan membahas permasalahan dari segi hukum dengan melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori yang berkaitan erat dengan permasalahan yang dibahas. Pada penelitian ini penulis menganalisis Ketentuan batas minimum calon pemegang kartu kredit konsistensi PBI NO. 14/2/PBI 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia NOMOR 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu terhadap undang-undang yang mengatur tentang batasan umur. Permasalahan tersebut dikaji berdasarkan Batasan umur yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata dan Pasal 47 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **C.1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)**

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang mengatur mengenai batasan umur calon pemegang kartu kredit. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum tentang batasan umur calon pemegang kartu kredit.

#### **C.2. Jenis Bahan dan Sumber Hukum**

##### **C.2.1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kartu kredit khususnya dalam hal batasan umur seseorang mengajukan kartu kredit.



### **C.2.2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer<sup>5</sup>. Bahan hukum sekunder ini berupa penjelasan undang-undang, hasil penelitian, buku-buku teks, dan berita internet yang dilakukan oleh para pakar terkait dengan pembahasan mengenai batas minimum calon pemegang kartu kredit konsistensi PBI NO. 14/2/PBI 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia NOMOR 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu terhadap undang-undang yang mengatur tentang batasan umur.

### **C.2.3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier, juga merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus dan ensiklopedia yang terkait dengan pembahasan mengenai batas minimum calon pemegang kartu kredit konsistensi PBI NO. 14/2/PBI 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia NOMOR 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu terhadap undang-undang yang mengatur tentang batasan umur.

## **C.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penelitian Hukum Normatif, teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier<sup>6</sup>.

Bahan hukum primer dikumpulkan dengan melakukan penelusuran berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan batas minimum calon pemegang kartu kredit. Sedangkan bahan hukum

---

<sup>5</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, **Dualism Penelitian Hukum Normatif & empiris**, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar.2010), H. 157-159

<sup>6</sup> *Ibid*, H.160

sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan atau literatur mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan batas minimum calon pemegang kartu kredit dengan teknik mengutip, baik secara langsung maupun dengan mengutip ide, atau gagasan yang terdapat dalam sumber aslinya. Selain itu juga memakai teknik mengakses dan mengcopy atau menyalin dari internet artikel-artikel ataupun jurnal-jurnal hukum online yang berkaitan dengan batas minimum calon pemegang kartu kredit..

#### **C.4. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Dalam hal ini pengolahan bahan dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan hukum sekunder kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, dan dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian<sup>7</sup>.

Berdasarkan metode interpretasi sistematis, yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dari yang hirarki yang paling rendah hingga tertinggi yang berkaitan dengan batas minimum calon pemegang kartu kredit konsistensi PBI NO. 14/2/PBI 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia NOMOR 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu terhadap undang-undang yang mengatur tentang batasan umur.

---

<sup>7</sup> Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, (Malang: Bayumedia, 2010) H. 392

## **D. Pembahasan**

### **D.1. Batasan Usia Pengaturan Kartu Kredit Berdasarkan Pasal 15 A PBI**

#### **NO. 14/2/PBI/2012 tentang APMK**

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Perubahan atas undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dirumuskan dalam Pasal 1 angka 8 bahwa Peraturan Bank Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan dan dianut dalam lembaran negara Republik Indonesia. Berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 8 tersebut, dapat disimpulkan bahwa Bank Indonesia mempunyai wewenang untuk mengeluarkan peraturan yaitu Peraturan Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam Lembaran Negara. Dimana dalam Peraturan Bank Indonesia ini sebagai pedoman bagi semua bank untuk menjalankan kegiatannya dalam bidang perekonomian.

Pada tanggal 6 Januari 2012 Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Baru yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu. Aturan terbaru tersebut lebih banyak mengubah ketentuan mengenai kartu kredit dari pada APMK lainnya, yakni kartu debit dan anjungan tunai mandiri. Perubahan Peraturan Bank Indonesia ini diterbitkan untuk meningkatkan penerapan aspek kehati-hatian, aspek perlindungan konsumen, dan manajemen risiko pemberian kredit dalam penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK). Perubahan peraturan bank indonesia yang diterbitkan pada 6 Januari 2012 ini bertujuan untuk menghadapi

perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk Perbankan.

Dalam aturan baru yang diterbitkan bank indonesia ini juga terdapat aturan tentang kriteria kelayakan nasabah, ditentukan berdasarkan batas minimum usia calon pemegang kartu dan batas minimum pendapatan. Namun dalam penetapan batas usia calon pemegang kartu kredit yang terdapat dalam Pasal 15A ayat 1 (a) PBI Nomor 14/2/PBI/2012 tentang APMK, yang berbunyi :

Dalam menerapkan manajemen risiko sebagai dimaksud pada pasal 15, Penerbit Kartu Kredit wajib menerapkan manajemen risiko kredit dengan memperhatikan paling kurang hal-hal sebagai berikut :

a. Batas minimum usia calon Pemegang Kartu

Maksud dari PBI Pasal 15 A batas minimum usia calon Pemegang Kartu Kredit ini dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 15 A :

Persyaratan batas minimum usia, batas minimum pendapatan, batas maksimum plafon kredit, batas maksimum jumlah Penerbit yang dapat memberikan fasilitas Kartu Kredit, dimaksudkan agar Pemegang Kartu bijak menggunakan Kartu Kredit sebagai alat pembayaran yang dananya bersumber dari kredit serta penggunaannya sesuai dengan kemampuan bayar. Batas minimum usia calon Pemegang Kartu dibuktikan dengan dokumen identitas resmi, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), atau paspor.

Dari penjelasan Pasal 15 A PBI Nomor 14/2/PBI/2012 tentang APMK terdapat batasan umur calon pemegang kartu kredit tetapi untuk mengetahui batasan umur yang diberlakukan di Indonesia dapat dilihat melalui peraturan – peraturan yang saat ini berlaku di indonesia yaitu KUHPerdara dan Undang-Undang Perkawinan.

#### 1. Analisis Batasan Umur Pemegang Kartu Kredit Berdasarkan KUHPerdara

Kecakapan melakukan tindakan hukum dalam hukum perdata, dikaitkan dengan unsur kedewasaan dan secara tidak langsung ada kaitannya dengan unsur umur umur dalam KUHPerdara diatur dalam beberapa pasal, antara lain :

#### Pasal 29 KUHPerdara

Seorang jejak yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun, seperti pun seorang gadis yang belum mencapai umur genap lima belas tahun, tak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan.

Pasal 330 KUHPerdara : “ Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak terlebih dahulu kawin”

Tetapi pasal 29 KUHPerdara dan pasal 330 KUHPerdara ini sudah tidak dipakai lagi karena asas *lex posteriori derogat lex priori* dimana peraturan yang baru menggantikan peraturan yang lama.

Pasal 419 KUHPerdara : “Dengan melakukan perlunakan, seorang anak belum dewasa boleh dinyatakan dewasa, atau bolehlah diberikan kepadanya hak kedewasaan yang tertentu.”

#### Pasal 426 KUHPerdara

Perlunakan, dengan mana kepada seseorang belum dewasa diberikan hak-hak kedewasaan tertentu atas permintaan si belum dewasa boleh diberikan oleh Pengadilan, apabila ia telah mencapai umur genap delapan belas tahun.

## 2. Analisis Batasan Umur Pemegang Kartu Kredit Berdasarkan UU Perkawinan.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah pedoman untuk hukum yang berlaku di Indonesia dalam menentukan kedewasaan yang dikaitkan dengan umur, yang dijelaskan dalam beberapa pasal, antara lain :

Pasal 6 ayat 2 Undang-undang Nomor 01 tahun 1974 : “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.”

Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 01 tahun 1974 : “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”

Pasal 47 ayat 1 Undang-undang Nomor 01 Tahun 1974 : “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.”

## **D.2. Pengaturan tentang Kartu Tambahan dan Kartu Utama (Kartu Kredit)**

### **1. Kartu Tambahan**

Bank dapat mengeluarkan Kartu Tambahan kepada orang yang ditunjuk sebagai Pemegang Kartu Tambahan oleh Pemegang Kartu. Ketentuan dan Persyaratan ini berlaku pula untuk penggunaan Kartu Tambahan dan istilah “Kartu” akan meliputi Kartu Utama beserta Kartu Tambahan. Pemegang Kartu terikat dengan dan bertanggung jawab atas penggunaan Kartu Tambahan. Pemegang Kartu Tambahan tidak diijinkan menggunakan Automated Teller Machine/Anjungan Tunai Mandiri (ATM) untuk mengoperasikan Rekening yang Dinominasikan, kecuali jika Pemegang Kartu Tambahan merupakan Penandatangan yang ditunjuk atas Rekening yang dinominasikan tersebut.

### **2. Kartu Utama (Kartu Kredit)**

Yang dimaksud kartu utama oleh penulis adalah kartu kredit. Dimana pengertian tentang kartu kredit telah dijelaskan sebelumnya. Kartu utama mempunyai tanggung jawab tinggi terhadap kartu tambahan. Risiko pemegang kartu utama lebih besar daripada risiko pemegang kartu tambahan.

## **D.3. Analisis Kartu Kredit Sama dengan Kebiasaan Umum Didunia Perbankan Seperti dalam Membuka Tabungan dan Membuka ATM.**

Dalam kebiasaan di dunia perbankan selalu bergantung dalam perekonomian terutama pada bank. Dalam hal ini bank memiliki beberapa kegiatan diantaranya sebagai pihak penerbit kartu ATM, kartu Kredit, dan Pembukaan Rekening. Bank dalam bertindak sebagai penerbit Pembukaan Rekening Tabungan, kartu ATM, dan Kartu kredit memiliki persamaan yaitu sama-sama memiliki syarat tertentu yang perlu diajukan untuk melakukan permohonan sesuai kebijakan bank masing-masing. Seperti dalam kartu kredit, mekanisme pembayaran dengan kartu debit juga perlu proses otorisasi ditambah penggunaan PIN (*Personal Identification Number*) oleh pemegang kartu. Namun juga terdapat beberapa perbedaan bank sebagai penerbit kartu kredit seperti dalam judul penulis dengan kartu debit(ATM) dan pembukaan rekening

#### **D.4. Konsistensi PBI Pasal 15 A No. 14/2/PBI/2012 Tentang APMK dengan KUHPerdata dan UU Perkawinan.**

##### **1. Konsistensi PBI Pasal 15 A No. 14/2/PBI/2012 Tentang AMPK Terhadap KUHPerdata**

Dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 ini harus dilihat dan dianalisis mengenai konsistensinya dengan KUHPerdata khususnya dalam batasan umur calon pemegang kartu kredit. Mendasar dalam penerbitan kartu kredit tidak terlepas dari KUHPer terutama yang mengatur tentang perjanjian. Karena penerbitan kartu kredit ini merupakan salah satu perjanjian yang lahir melalui lembaga keuangan secara efisien dan lintas batas yurisdiksi. Sebagai suatu perjanjian, penerbitan kartu kredit harus memenuhi unsur-unsur perjanjian yang harus diperhatikan adalah unsur *essensialia*, unsur *naturalia* dan unsur *accidentalia*<sup>8</sup>.

Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi berarti tidak ada perjanjian, sehingga tidak mempunyai akibat hukum bagi para pihak calon pemegang kartu kredit. Setelah mengetahui adanya perjanjian langkah selanjutnya meneliti syarat-syarat umum sahny suatu

---

<sup>8</sup> Laksanto Utomo, **Aspek Hukum Kartu Kredit dan Perlindungan Konsumen**, (Bandung : Alumni.2011), H. 69-70

perjanjian telah terpenuhi oleh para pihak calon pemegang kartu kredit, yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara, yang berbunyi :

“Untuk syahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka mengikat dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal”

Dari penjelasan syarat umum perjanjian diatas dapat ditarik kesimpulan terutama berkaitan dengan kosnsitensi Pasal 15 A PBI Nomor 14/2/PBI/2012 dengan KUHPerdara yang berkaitan dengan batas minimum usia calon pemegang kartu kredit. Pada syarat perjanjian kedua tentang kecakapan seseorang dalam penerbitan kartu kredit. Kecakapan pada dasarnya, setiap orang yang telah dewasa dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Pasal 1320 ayat (2) KUHPerdara mendapat pejabaran lebih lanjut tentang pengaturan usia dewasa adalah Pasal 1330 KUHPerdara. Patokan dalam Pasal 1330 KUHPerdara yang berbunyi :

Tak cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan adalah:

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah membuat persetujuan-persetujuan tertentu.

Secara *a contrario* dapat disimpulkan, bahwa dewasa adalah mereka yang :

- a. Telah berumur 21 tahun
- b. Telah menikah, termasuk mereka yang belum berusia 21 tahun, tetapi belum menikah.
- c. Tidak dibawah pengampuan.

Namun dalam Penjelasan Pasal 15 A Nomor 14/2/PBI/2012 tentang APMK, yang berbunyi :

Persyaratan batas minimum usia, batas minimum pendapatan, batas maksimum plafon kredit, batas maksimum jumlah Penerbit yang dapat memberikan fasilitas Kartu Kredit, dimaksudkan agar Pemegang Kartu



bijak menggunakan Kartu Kredit sebagai alat pembayaran yang dananya bersumber dari kredit serta penggunaannya sesuai dengan kemampuan bayar. Batas minimum usia calon Pemegang Kartu dibuktikan dengan dokumen identitas resmi, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), atau paspor.

Disini terdapat perbedaan tentang batas minimum usia calon pemegang kartu kredit menurut KUHPerdata dan PBI Nomor 14/2/PBI/2012. Dimana dalam PBI Nomor 14/2/PBI/2012 dijelaskan bahwa batas minimum usia calon pemegang kartu kredit dibuktikan dengan dokumen identitas resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), atau paspor. Dalam peraturan pemerintah usia pemegang Kartu Tanda Penduduk usia 17 tahun. Jadi secara tidak langsung PBI mengatakan calon pemegang kartu kredit ini usia 17 tahun.

Dalam hal ini PBI tidak konsisten pada KUHPerdata, karena peraturan bank indonesia menerbitkan statment seperti pasal 15 A usai 17 tahun. Padahal dalam pelaksanaannya PBI harus mendasar pada KUHPerdata dalam mengambil keputusan untuk memberikan kartu kredit kepada seseorang yang menurut undang-undang dianggap cakap. Sedangkan usia 17 tahun seperti yang disebut Pasal 15 A PBI No. 14/2/PBI/2012 tentang APMK dianggap tidak cakap karena dalam hukum yang berlaku di Indonesia seseorang dianggap cakap atau dewasa usia 18 tahun. Mengingat dasar dibuatnya perjanjian sampai saat ini masih berpedoman pada syarat syah perjanjian pasal 1320KUHPerdata terutama dalam hal kecakapan dalam penerbitan kartu kredit harus diperhatikan batasan usia nya . Kecuali jika seseorang yang berusia 17 tahun itu sudah menikah maka boleh mendapatkan kartu kredit mengingat aturan pengecualian untuk seseorang yang belum cakap dapat dianggap cakap. Tetapi jika seseorang yang berusia 17 tahun belum menikah bisa mendapatkan kartu kredit maka dapat batal demi hukum dan perjanjian kredit nya tidak syah karena tidak memenuhi syarat-syarat syah perjanjian

terutama dalam hal kecakapan seseorang yang dapat melakukan perjanjian.

2. Konsistensi PBI Pasal 15 A No. 14/2/PBI/2012 Tentang AMPK Terhadap UU Perkawinan

Batasan usia calon pemegang kartu kredit dalam Pasal 15 A PBI No 14/2/PBI/2012 dapat dilihat juga dari UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Saat ini kita sudah memiliki hukum nasional yang merupakan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan, yaitu UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan aturan pelaksanaannya PP No 9 tahun 1974. Dengan berlakunya UU tersebut maka semua peraturan hukum yang mengatur perkawinan sepanjang telah diatur dalam UU No 1 tahun 1974 tidak berlaku lagi. Demikian juga Hukum Perkawinan yang diatur dalam Buku KUHPerdara, hukum perkawinan tersebut tidak berlaku lagi sepanjang belum diatur dalam UU No 1 Tahun 1974. Sebaliknya, masih berlaku sepanjang belum diatur dan memang ditunjuk masih berlaku oleh UU No 1 tahun 1974<sup>9</sup>.

Menurut Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>10</sup>.

Dalam UU Perkawinan ini diatur juga batasan umur yang saat ini dipakai oleh Hukum Indonesia sebagai ukuran batasan umur seseorang memperoleh kewenangan dalam bertindak. Yang terdapat dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi : “Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas tahun) dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun).”

---

<sup>9</sup> Komariah, **Hukum Perdata**, (Malang : UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2008), H.39

<sup>10</sup> Harumiati Natadimaja, **Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan Dan Hukum Benda**, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009), H.21

Namun dalam hukum perkawinan ini di izinkan melakukan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun<sup>11</sup>, asalkan memenuhi beberapa kriteria yang tercantum dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam prinsip ekonomi hampir spesifik dengan hukum perkawinan tentang batasan umur usia dianggap dewasa. Tetapi dalam Peraturan Bank Indonesia No 14/2/PBI/2012 tentang APMK yang mengatur batasan usia calon pemegang kartu kredit yang dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 15 A, yaitu :

Persyaratan batas minimum usia, batas minimum pendapatan, batas maksimum plafon kredit, batas maksimum jumlah Penerbit yang dapat memberikan fasilitas Kartu Kredit, dimaksudkan agar Pemegang Kartu bijak menggunakan Kartu Kredit sebagai alat pembayaran yang dananya bersumber dari kredit serta penggunaannya sesuai dengan kemampuan bayar. Batas minimum usia calon Pemegang Kartu dibuktikan dengan dokumen identitas resmi, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), atau paspor.

Jika batasan usia calon pemegang kartu kredit yang dijelaskan dalam Pasal 15 A PBI No 14/2/PBI/2012 dikaitkan dengan batasan usia yang dipakai dalam hukum yang berlaku di indonesia pada saat ini yaitu Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dimana dalam PBI no 14/2/PBI/2012 untuk usia calon pemegang kartu kredit dibuktikan dengan kepemilikan KTP , SIM atau Paspor. Secara tidak langsung PBI memberikan batasan usia 17 tahun untuk calon pemegang kartu kredit. Sedangkan dalam UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah dijelaskan diatas untuk usia dewasa pada pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, tetapi harus ada ijin dari orang tua dan untuk usia seseorang dapat dikatakan dewasa adalah usia 18 tahun yang dijelaskan dalam pasal 47 ayat 1 Undang-Undnag Perkawinan.

---

<sup>11</sup> Abdul Maman dan Fauzan, **Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama**, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2002) H.8-9

Mendasar dari Undang-Undang perkawinan tentang batasan usia seseorang dikatakan dewasa. Terlihat PBI tidak konsisten dengan peraturan UU Perkawinan tentang batasan usia calon pemegang kartu kredit. Karena dalam Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang No 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sekarang di gunakan di Indonesia sebagai batasan usia seseorang dianggap dewasa adalah 18 tahun, sedangkan yang diatur dalam Pasal 15A PBI No. 14/2/PBI/2012 tentang APMK batas minimum usia seseorang dapat memperoleh kartu kredit 17 tahun. Tetapi jika seseorang yang berusia 17 tahun telah menikah bisa mendapatkan kartu kredit karena adanya aturan pengecualian, sedangkan yang berusia 17 tahun belum menikah dapat mempunyai kartu kredit bisa batal demi hukum karena tidak cakap dan tidak dapat mempertanggungjawabkan tindakan nya. Walaupun tidak memiliki kartu kredit mereka dapat memiliki kartu tambahan, yang tanggung jawabnya dipegang oleh pemilik kartu utama.

### **Kesimpulan**

Konsistensi Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/2/PBI/2012 dalam ketentuan batas minimum usia calon pemegang kartu kredit terhadap KUHPdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari penelitian diatas Peraturan Bank Indonesia (PBI) tidak konsisten karena dalam mengambil keputusan untuk memberikan kartu kredit harus melihat batas usia yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang saat ini dipakai oleh indonesia yaitu 18 tahun sebagai batas penentu seseorang dianggap cakap sedangkan batasan usia minimum dalam PBI no 14/2/PBI/2012 tentang APMK 17 tahun . Tetapi dalam hal ini untuk seseorang yang dianggap cakap menurut undang-undang ini dapat mendapatkan kartu kredit sedangkan yang tidak cakap hanya mendapat kartu tambahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Maman dan Fauzan. **Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama**. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2002.
- Endang Puraningsih. **Hukum Bisnis**. Ghalia Indonesia. Bogor. 2010.
- Harumiati Natadimaj. **Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan Dan Hukum Benda**. Graha Ilmu .Yogyakarta.2009
- Johnny Ibrahim. **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**. Bayumedia Malang.2010.
- Komariah. **Hukum Perdata**, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang. Malang.2008.
- Laksanto Utomo. **Aspek Hukum Kartu Kredit dan Perlindungan Konsumen**. Alumni. Bandung. 2011
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. **Dualism Penelitian Hukum Normatif & Empiris**. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2010
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. **Bab-bab Tentang Penemuan Hukum**. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1993.

### Internet

- Admin Mafia Kartu Kredit,2011, *Persyaratan Usia Memiliki Kartu Kredit*, <http://www.mafiakartukredit.com/2011/07/persyaratan-usia-memiliki-kartu-kredit.html>. (13 Mei 2012,)